

Peran Pemerintah Kecamatan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan Ekonomi: Studi di Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa

Frangky Erwin Dede Robial¹, Muhamad Rifki Botutihe²

¹Universitas Pembangunan Indonesia Manado

²Politeknik Kebangsaan

E-mail: robial.frangky@gmail.com*

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan serta tingkat partisipasi masyarakat di dalamnya. Pemerintah kecamatan idealnya menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai struktur perantara, pelayan masyarakat, dan agen pembangunan, namun sosialisasi kebijakan yang belum optimal berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang tersebar di tiga desa sampel, yaitu Kalasey Satu, Tateli Tiga, dan Tateli Satu, yang masing-masing diwakili oleh satu tokoh masyarakat, satu tokoh agama, satu sekretaris desa, dan satu hukum tua. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan belum sepenuhnya optimal menjalankan perannya sebagai dinamisor, katalisator, dan pelopor pembangunan karena minimnya koordinasi dan keterlibatan langsung di lapangan. Partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk tenaga, pemikiran, maupun materi, masih terbatas dan belum merata di setiap desa. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran, tingkat pendidikan, sikap mental, dan tradisi masyarakat setempat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi, transparansi kebijakan, serta pengawasan langsung pemerintah kecamatan agar pembangunan berjalan lebih partisipatif dan tepat sasaran.

Kata kunci: peran pemerintah kecamatan, implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, pembangunan desa, Kecamatan Mandolang

Abstract

This study aims to examine the role of the Mandolang Subdistrict Government in Minahasa Regency in implementing development policy and the level of community participation involved. Ideally, the subdistrict government carries three main roles: intermediary structure, public servant, and development agent, yet limited policy dissemination has resulted in low

community participation. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Twelve informants were drawn from three sample villages, namely Kalasey Satu, Tateli Tiga, and Tateli Satu, each represented by a community leader, a religious leader, a village secretary, and a village head. Data were collected through literature study, observation, and interviews, then analyzed descriptively. The findings show that the subdistrict government has not fully optimized its role as a dynamizer, catalyst, and development pioneer due to limited coordination and direct field engagement. Community participation, whether in the form of labor, ideas, or material contributions, remains limited and unevenly distributed across villages. The main inhibiting factors include low public awareness, education levels, mental attitudes, and local traditions. The study recommends strengthening communication, policy transparency, and direct field supervision so that development can proceed more participatively and effectively.

Keywords: *subdistrict government role, policy implementation, community participation, village development, Mandolang Subdistrict*

Pendahuluan

Kecepatan rombongan kafilah ditentukan oleh kecepatan gerobak yang paling lambat—ungkapan ini menggambarkan kedudukan kecamatan sebagai subsistem pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan nasional yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa pengaturan pemerintahan yang tidak berpijak pada karakteristik masyarakat setempat hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan, sementara pemerintah pada setiap tingkatan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui proses perubahan yang disadari dan direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, pemerintah dapat dimaknai sebagai alat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara (Pamudji, 1986; Ndraha, 2003). Kebijakan publik dipahami sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, mencakup tindakan nyata pemerintah dan bukan sekadar pernyataan maksud (Jones, 1991; Suharto, 2006). Implementasi kebijakan sendiri diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut, sedangkan pembangunan dipahami sebagai proses perencanaan dan perubahan tatanan hidup masyarakat yang disadari menuju kondisi yang lebih baik (Khairuddin, 1992; Tjokroamidjojo, 1982). Kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, yang memberi ruang bagi setiap daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya masing-masing.

Kecamatan Mandolang di Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kecamatan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang beragam, mencakup petani, nelayan, buruh, hingga masyarakat yang beraktivitas di perkotaan. Dengan tiga peran utama pemerintah kecamatan sebagai struktur perantara, pelayan masyarakat, dan agen pembangunan implementasi kebijakan pembangunan di wilayah ini masih dihadapkan pada persoalan minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, baik dari segi pemikiran maupun tenaga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Mandolang dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan di Kecamatan Mandolang, sekaligus diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu pemerintahan serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah kecamatan dalam menjalankan perannya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran mengenai suatu masyarakat atau kelompok tertentu berikut relasi antargejala yang diamati secara alamiah tanpa manipulasi eksperimental (Suryabrata, 1998).

Populasi penelitian adalah masyarakat Kecamatan Mandolang yang terbagi dalam 12 desa. Sampel penelitian ditentukan secara purposif pada tiga desa, yaitu Kalasey Satu, Tateli Tiga, dan Tateli Satu. Dari setiap desa dipilih empat informan yang terdiri atas satu tokoh masyarakat, satu tokoh agama, satu sekretaris desa, dan satu hukum tua, sehingga total informan berjumlah 12 orang yang tersebar di Kecamatan Mandolang.

Variabel penelitian terdiri atas variabel independen, yaitu peran pemerintah, dan variabel dependen, yaitu implementasi kebijakan pembangunan. Peran pemerintah dioperasionalkan melalui proses perencanaan, pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan implementasi kebijakan pembangunan dioperasionalkan melalui tindakan nyata pemerintah dalam melaksanakan kebijakan guna meningkatkan pembangunan daerah.

Data dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu (1) studi kepustakaan, dengan mempelajari buku dan bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian, dan (2) studi lapangan, meliputi observasi langsung di lokasi penelitian serta wawancara dengan informan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan peran pemerintah kecamatan.

Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, dengan merujuk pada kerangka metodologi pemerintahan yang menekankan keterpaduan antara aparatur dan masyarakat dalam proses pembangunan (Ndraha, 1985; Moleong, 2009). Analisis dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara terkait persepsi masyarakat maupun kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Mandolang.

Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Mandolang menaungi wilayah dengan masyarakat yang majemuk, mulai dari petani, nelayan, hingga pekerja di perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 informan di tiga desa sampel, diperoleh gambaran mengenai peran pemerintah kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan sebagai berikut.

Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan

Sebagai penyelenggara pembangunan, pemerintah kecamatan idealnya menjalankan tiga peran, yaitu sebagai dinamisator, katalisator, dan pelopor pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah dituntut memberi bimbingan dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif; sebagai katalisator, pemerintah mengoordinasikan faktor-faktor pendorong pembangunan; dan sebagai pelopor, pemerintah memberi teladan agar dihormati masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Mandolang belum sepenuhnya optimal menjalankan ketiga peran tersebut. Sebagian informan menilai kebijakan pembangunan belum tepat sasaran dan hanya menjangkau desa-desa tertentu, sementara desa lain termasuk jalan-jalan umum yang rusak belum banyak tersentuh program kecamatan. Kondisi ini sejalan dengan gambaran umum pemerintahan kecamatan sebagai ujung tombak birokrasi daerah yang berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat (Sarundajang, 2005).

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu tenaga, ide atau pemikiran, harta benda (uang dan bahan material), serta pemeliharaan hasil pembangunan. Dari 12 informan, sebagian besar menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, baik dalam

bentuk tenaga maupun pemikiran, masih belum memadai. Rendahnya partisipasi ini erat kaitannya dengan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan serta lemahnya koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.

Kemampuan Pemerintah dalam Mengelola Pembangunan Fisik dan Nonfisik

Dalam pembangunan fisik, pemerintah kecamatan melakukan pemantauan berkala melalui laporan kegiatan dari setiap desa serta kunjungan langsung ke lokasi proyek, misalnya pembangunan sarana air minum, MCK, dan saluran air. Pada pembangunan nonfisik, upaya yang dilakukan meliputi pendistribusian program berdasarkan prioritas kebutuhan mendesak, pembinaan pendidikan, pengembangan keterampilan usaha melalui program PKK, serta pembinaan kegiatan kepemudaan. Meski demikian, kemampuan koordinasi pemerintah kecamatan dengan masyarakat desa dinilai masih lemah sehingga hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan merata, selaras dengan pandangan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas pembinaan pemerintah kecamatan terhadap aparatur dan masyarakat desa (Wasistiono, 2007).

Upaya dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah, antara lain membina komunikasi berkelanjutan dengan aparatur desa dan masyarakat, mendorong transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, serta melakukan pengawasan langsung terhadap proyek pembangunan. Akan tetapi, implementasi kebijakan pembangunan di Kecamatan Mandolang masih dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi tanpa harus dimobilisasi, tingkat pendidikan yang bervariasi, sikap mental masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan, serta faktor tradisi lokal yang turut memengaruhi pola partisipasi masyarakat sehari-hari (Widjaja, 1982). Faktor-faktor ini menuntut kebijaksanaan pemerintah kecamatan dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat agar tingkat partisipasi tidak semakin menurun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Mandolang belum sepenuhnya optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan, terutama karena minimnya sosialisasi kebijakan dan lemahnya koordinasi dengan masyarakat desa. Pemerintah kecamatan memiliki kemampuan yang cukup signifikan dalam menyelenggarakan program pembangunan fisik maupun nonfisik, namun pembinaan masyarakat secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat—baik

dalam bentuk tenaga, pemikiran, maupun pemeliharaan hasil pembangunan—dapat tumbuh secara merata di setiap desa. Penguatan komunikasi, transparansi kebijakan, serta pengawasan langsung di lapangan menjadi kunci agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Mandolang, aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Kalasey Satu, Tateli Tiga, dan Tateli Satu, Kabupaten Minahasa, atas kesediaan dan waktu yang diberikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Jones, C. O. (1991). *Pengantar kebijakan publik*. Rajawali Press.
- Khairuddin. (1992). *Pembangunan masyarakat*. Liberty.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (1985). *Metodologi pemerintahan Indonesia*. Bina Aksara.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.
- Pamudji, S. (1986). *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sarundajang, S. H. (2005). *Sistem pemerintahan daerah*. Kata Hasta Pustaka.
- Suharto, E. (2006). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, B. (1982). *Perencanaan pembangunan*. PT Gunung Agung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wasistiono, S. (2007). *Prospek pengembangan desa*. CV Fokusmedia.
- Widjaja, A. (1982). *Budaya politik dan pembangunan ekonomi*. LP3ES.